Menjaga Umat Menuju Aceh Halal

Sumbangsih MPU Aceh tentu hal ini (sertifikasi halal) harus terus kita lakukan agar masyarakat kita mengkonsumsi makanan yang halal dan higienis, juga memenuhi standar kesehatan.

TGK H FAISAL ALI, Ketua MPU Aceh

BIRO ADPIM SEKDA ACEH

PENGUKUHAN - Pj Gubernur Aceh, Bustami mengukuhkan Tim Terpadau Penataan dan Pengawasan Sistem Jaminan Produk Halal LPPOM MPU Aceh, di Gedung Serbaguna MPU Aceh, Kamis, (6/6/2024).

Fatwa dan Thausyiah untuk Kemaslahatan

MAJELIS Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh sebagai lembaga fatwa memiliki fungsi menetapkan fatwa yang dapat menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang pemerintah, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi serta memberikan nasehat dan bimbingan kepada masyarakat berdasarkan ajaran Islam.

Dalam dua tahun ini, MPU Aceh telah mengeluarkan 4 Fatwa dan 9 Thausyiah pada tahun 2022. Kemudian 6 Fatwa dan 9 Thausyiah pada tahun 2023. Sementara hingga Juni 2024, MPU Aceh telah mengeluarkan 2 Fatwa dan 3 Thausyiah.

Dua Fatwa yang dikeluarkan oleh MPU Aceh pada tahun 2024 yakni tentang pembegalan hukumnya haram dan termasuk dosa besar bagi para mukallaf, dan fatwa tentang penyembelihan dan penyucian bahan pangan dan nonpangan menurut hukum Islam, adat Aceh, dan medis.

Terkait fenomena yang terjadi di Aceh dalam bulan Juni 2024, yakni tingginya kasus HIV/Aids dan maraknya kasus judi online, Ketua MPU Aceh Tgk H Faisal Ali mengatakan pihaknya telah jauh-jauh hari menerbitkan satu keputusan dan fatwa yang mengatur persoalan tersebut.

Pertama, Keputusan MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Muzakarah Masalah Keagamaan-I: Penanganan LGBT di Aceh. Ini mengatur persoalan penanganan dan sanksi untuk komunitas LGBT dan meminta pemerintah melakukan program pencegahan HIV/AIDS di kalangan LGBT.

Kemudian kedua, Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Judi Online. Ini menegaskan bahwa perbuatan judi online hukumnya haram dan meminta pemerintah dan masyarakat wajib memberantas segala jenis perjudian.

Ketua MPU Aceh, Tgk H Faisal Ali mengatakan semua Fatwa dan Taushiyah yang dikeluarkan oleh MPU Aceh sama sekali tidak ada kepentingan politik maupun kelompok tertentu. Fatwa MPU Aceh semuanya untuk kemaslahatan umat Islam dan masyarakat Aceh umumnya.

"Masyarakat kita harus memiliki landasan-landasan yang kuat terhadap masalah yang mereka hadapi ditengah-tengah masyarakat itu sendiri," jelasnya, sembari berharap perlu adanya kerjasama berbagai pihak dan pemerintah dalam mengimplementasikan fatwa-fatwa MPU Aceh agar berbagai problematika yang terjadi dapat diselesaikan sesuai dengan hukum Islam. **(*)**

MPU Telah Mengkader 1.165 Ulama

SELAIN sebagai lembaga fatwa, MPU Aceh juga diberikan tugas dan kewenangan untuk melakukan pengkaderan ulama. Hal ini sebagaimana amanat Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang MPU Aceh. Kaderisasi ulama bertujuan untuk memperkuat peran ulama muda dalam menjaga dan melestarikan aqidah Ahlussunnah Wal Jama'ah di tengah masyarakat.

Ketua MPU Aceh, Tgk H Faisal Ali mengatakan, Pendidikan Kader Ulama (PKU) sebagai bentuk pembekalan para teungku-teungku muda Aceh dengan menghadapi masalah-masalah kekinian dan pentingnya peningkatan kapasitas keilmuan dalam berbagai bidang terutama aspek menulis dan IT.

"Teungku-teungku muda bukan hanya bisa menyampaikan pesan-pesan turats ke masyarakat awam tetapi juga untuk kalangan intelektual," ungkap Abu Faisal. Sejak tahun 2004 hingga Mei 2024, MPU Aceh telah mengkader 1.165 ulama.

Abu Faisal berharap, mereka yang sudah ikut PKU untuk selalu meningkatkan sumber daya manusia (SDM) keagamaan mereka dan menjadi lokomotif penggerak masyarakat dalam menggapai kesejahteraan.

Kaderisasi ulama ini diharapkan bisa melahirkan 'alim ulama yang berwawasan kedepan dalam menghadapi masyarakat yang semakin terbuka dan maju, berkepribadian independen dan juga menjadi panutan masyarakat.**(*)**

SISTEM Jaminan Produk Halal sebagai bagian dari keistimewaan Aceh dalam bidang penerapan Syariat Islam, telah menjadi komitmen bersama yang harus dilaksanakan secara optimal sebagai upaya perlindungan usaha dan kepastian tersedianya produk halal. Pelaksanaan sertifikasi halal masih terus digalakkan.

Hal itu merupakan salah satu wujud dari implementasi Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Sertifikasi dilaksanakan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh.

Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Bustami Hamzah secara resmi telah mengukuhkan Tim Terpadu Penataan dan Pengawasan Sistem Jaminan Produk Halal LPPOM MPU Aceh pada Kamis (6/6/2024) lalu. Tim Terpadu ini diketuai oleh Wakil Ketua MPU Aceh, Prof Dr Tgk H Muhibbuththabary MAg.

Nantinya, Tim Terpadu LPPOM MPU Aceh ini akan bertugas melakukan penataan dan pengawasan terhadap pelaku usaha dan produk halal di Aceh. Selain itu juga akan melakukan pembinaan dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya produk halal dalam kehidupan sehari-hari.

Mengingat Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI 2024 akan dilaksanakan di Aceh September mendatang, sudah sepatutnya Aceh menyediakan produk-produk halal bagi atlet dan tamu yang datang dari berbagai daerah di Indonesia.

Ketua MPU Aceh, Tgk H Faisal Ali mengatakan makanan yang disuguhkan kepada para atlet dan tamu-tamu yang akan datang ke Aceh harus betul-betul dipastikan sudah tersertifikasi halal. Pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikasi halal agar terus menjaga produknya agar tetap halal dikonsumsi.

"Sumbangsih MPU Aceh tentu hal ini (sertifikasi halal) harus terus kita lakukan, agar masyarakat kita mengkonsumsi makanan yang halal dan higienis, juga memenuhi standar kesehatan," ujar ulama yang kerap disapa Abu Sibreh ini.

Berdasarkan data, LPPOM MPU Aceh telah mengeluarkan 962 sertifikasi halal sejak 2019 hingga Mei 2024, dengan jumlah 1.123 pemohon. Adapun jumlah sertifikasi halal terbanyak berada di Kota Banda Aceh yakni 267 setifikasi, dan disusul Aceh Besar 157 sertifikasi.

Terkait sanksi kepada pelaku usaha yang tidak menjalankan komitmennya, Abu Faisal mengatakan bahwa sampai saat ini masih dilakukan secara persuasif kepada pelaku usaha. "Memang di Qanun itu ada pasal terkait sanksi, tapi kita belum sampai ke sanksi, kita lebih kepada persuasif lebih mengetuk hati pelaku-pelaku usaha ini," ungkapnya.

MPU Aceh telah mengeluarkan Thausyiah No 3 Tahun 2023 tentang Penggunaan Produk Halal Aceh, di mana memerintahkan kepada Pemerintah Aceh dan SKPK dalam melaksanakan kegiatannya untuk menyediakan konsumsi dari rekanan yang sudah bersertifikasi halal.

Dalam poin kedua Thausyiah tersebut, Pemerintah Aceh mewajibkan kepada pelaku usaha di Aceh untuk segera mendapatkan sertifikasi halal di MPU Aceh.

Disisi lain, Gubernur Aceh juga telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 451.7/11662 tentang Pelaksanaan Sistem Jaminan Produk Halal, di mana Gubernur Aceh mewajibkan pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal produk yang dihasilkan seperti produk pangan, obat-obatan dan kosmetika termasuk juga rumah potong hewan, catering, dan rumah makan di LPPOM MPU Aceh.

Selain itu, SE tersebut juga mengajak masyarakat untuk senantiasa mengkonsumsi makanan/minuman dan sejenisnya yang sudah terjamin kehalalannya. Masyarakat juga turut berperan serta untuk mengawasi produk halal/sertifikasi produk halal yang beredar. **(*)**

Serambi KUTARAJA

Paman Bacok Keponakan

Perut Sobek, Usus Keluar

JANTHO - Seorang paman berinisial MF (60) warga Gampong Lamsiteh Cot, Kuta Malaka, tega membacok keponakannya berinisial AA (50) warga Lamjamee Lamkrak, Simpang Tiga, Aceh Besar, di warung kelontong sekitar Lamsiteh Cot, Sabtu (22/6/2024) pukul 21.10 WIB.

Kapolres Aceh Besar, AKBP Dhani Catra Nugraha SH SIK MH melalui Kapolsek Kuta Malaka, Ipda Islandi, mengatakan, pelaku menyerahkan diri dan langsung dibawa ke Polres untuk proses penahanan dan pendalaman lebih lanjut.

Korban dievakuasi ke RSUD Aceh Besar (Rumah Sakit Satelit Indrapuri), kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin (RSUDZA) Banda Aceh. "Korban sudah dioperasi dari semalam, sampai pagi tadi alhamdulillah masih normal dan baik-baik saja," kata Ipda Islandi kepada Serambi, Minggu (23/6/2024).

Korban sudah dioperasi dari semalam, sampai pagi tadi alhamdulillah masih normal dan baik-baik saja.

ISLANDI
Kapolsek Kuta Malaka

Dikatakan, kejadian berawal saat pelaku tidak sengaja bertemu dengan korban di salah warung kelontong. Dalam pertemuan tersebut, MF bertanya kepada keponakannya terkait harta warisan. Meski demikian, menurut keterangan pelaku, AA tidak menggubris dan malah menendangnya hingga terjatuh.

Emosi akibat perlakuan tersebut, pelaku kemudian bangun dan mengambil sebilah parang di jok motor miliknya dan langsung membacok korban mengenai area perut. "Korban terjatuh dengan luka sobek di perut yang membuat ususnya korban keluar," jelas Ipda Islandi.

Setelah melakukan pembacokan, pelaku langsung melarikan diri ke rumah keponakannya yang lain di Gampong Baroh, Montasik. Di sana pelaku menceritakan kronologi kejadian dan berinisiatif menyerahkan diri ke Polisi. Pelaku kemudian diarahkan ke Polsek Kuta Malaka dan diantar langsung keluarga pada pukul 22.40 WIB.**(rn)**

11 Gepeng Positif Narkoba

Hasil Tes Urine BNN Banda Aceh

BANDA ACEH - Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Banda Aceh melaksanakan tes urine terhadap gelandangan dan pengemis (gepeng) yang terjaring razia Satpol PP dan WH, Sabtu (22/6/2024) sore.

Tes urine dilaksanakan di Rumah Singgah Dinas Sosial Banda Aceh, Minggu (23/6/2024) dari pukul 09.00 WIB. Kegiatan ini dalam rangka mendeteksi dini penyalahguna narkoba.

Kepala BNN Banda Aceh, Kombes Pol Zahrul Bawadi SH MM, mengawasi langsung pelaksanaan tes urine tersebut. Hadir juga Kepala Tim Rehabilitasi Desi Rosdiana SKM MKM, Kasubag Umum Haslinda Saleh SST MKM dan Kepala Tim Pemberantasan Roni Ikhwal SKom.

Sedangkan dari Dinas Sosial hadir Plt Kepala Dinas Safwan SSos, jajaran Dinas Kesehatan Banda Aceh, Kepala Bidang P2P drg Supriady MKes serta tim Satpol PP dan WH.

Kombes Pol Zahrul Bawadi menyebutkan, dari 20 orang yang diperiksa, sebanyak 11 orang terkonfimasi positif penyalahguna narkoba.

Adapun ke 11 orang tersebut di antaranya delapan orang terkonfirmasi positif menggunakan methampetamin, amphetamin dan tiga orang terkonfirmasi menggunakan methampetamin, amphetamin dan THC.

IST

TES URINE - Kepala BNN Banda Aceh, Kombes Pol Zahrul Bawadi memantau proses pelaksanaan tes urine bagi gepeng yang terjaring razia Satpol PP dan WH di Rumah Singgah Dinas Sosial Banda Aceh pada Minggu (23/6/2024).

"Sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan, Kepala Tim Rehabilitasi sudah melakukan asesment awal terhadap 11 orang yang terkonfimasi positif," ujar Zahrul Bawadi.

Pj Kepala Tim Brantas juga sudah melaksanakan interogasi awal dan berkoordinasi dengan Dinsos untuk penanganan lebih lanjut.

Selanjutnya pihak Dinas Sosial menempatkan para gepeng yang terjaring razia ke Panti Asuhan UPTD Rumoh Sejahtera Beujroh Meukarya (RSBM) Ladong milik Dinas Sosial Aceh. **(mas/mun)**

Kapolresta Imbau Warga Jauhi Judi Online

BANDA ACEH - Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Fahmi Irwan Ramli melalui Kasi Humas Ipda Trisna Zunaidi mengimbau warga untuk menjauhi aktivitas judi online. Dikatakan, judi online (Judol) menjadi perhatian pihaknya karena meresahkan masyarakat, terutama kehidupan dalam lingkungan keluarga.

Selain itu, judi online juga menurutnya tidak akan meningkatkan finansial seseorang. "Tidak ada orang yang menjadi kaya karena judi," kata Ipda Trisna kepada Serambi, Minggu (23/6/2024).

Pihaknya mengimbau kepada warga Kota Banda Aceh dan sekitarnya agar tidak terlibat judi online yang marak dilakukan di tempat umum, seperti warung kopi dan tempat-tempat tongkrongan lainnya.

Sementara dalam hal pencegahan, Polresta bersama Polsek dan jajaran secara aktif melakukan patroli untuk memberikan imbauan ke masyarakat. Selain itu, Polresta Banda Aceh secara gencar melakukan penyuluhan bagi pengelola kedai kopi untuk mengingatkan pengunjungnya, agar tidak menjadikan waktu nongkrong sebagai ajang bermain judi online.

Diketahui sebelumnya, sebanyak 19 orang ditangkap karena kasus judi online di warung kopi. Mereka ditangkap di Gampong Lampulo, Kecamatan Kuta Alam dan Gampong Deah Glumpang, Kecamatan Meuraxa. Belasan tersangka itu diamankan pihak kepolisian di hari yang sama pada Sabtu (15/6/2024) lalu.

Sementara untuk kasus lain, sepanjang Juni per Minggu (23/6/2024), Polresta Banda Aceh mencatat sebanyak 24 laka lantas di antaranya tiga orang meninggal dunia, satu orang luka berat, 38 luka ringan dan jumlah kerugian materiil ditaksir mencapai Rp 90,2 juta. Selain itu, sebanyak satu kasus pencurian sepeda motor Beat di Kecamatan Peukan Bada.**(rn)**